



## DETERMINAN BELANJA MODAL UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2022)

Kevin Ariyanto<sup>1</sup>, Gregorius Nasiansenus Masdjojo<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

Email: [kevinariyanto0068@mhs.unisbank.ac.id](mailto:kevinariyanto0068@mhs.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [masdjojo@edu.unisbank.ac.id](mailto:masdjojo@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima : 19 Januari 2025

Disetujui : 14 April 2025.

### Abstract

*This study focuses on a quantitative approach aimed at explaining panel data regression analysis on the determinants of capital expenditure and its impact on regional financial independence. The data used includes Budget Realization Reports from 2018 to 2022. Fixed Effect Model (FEM) is picked as the best model based on statistical model testing to do regression. The findings indicate that capital expenditure serves as a bridge connecting Local Own-Source Revenue and balancing funds includes General Allocation Funds, and Special Allocation Funds to financial independence through asset acquisition, regional asset improvement, and regional economic development. Capital expenditure funded by Local Own-Source Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds has been proven to enhance Local Own-Source Revenue generation through the utilization of regional infrastructure and assets. This enables regions to gradually reduce dependency on government funding. In contrast, Revenue Sharing Funds do not significantly contribute to capital expenditure. Consequently, the expectation of increasing Local Own-Source Revenue through capital expenditure for acquiring fixed assets, which could enhance the region's capacity to deliver public services, remains unmet, ultimately failing to improve financial independence. The implications of this study can serve as a basis for local governments in formulating financial management strategies oriented toward enhancing fiscal independence.*

**Keywords:** Capital Expenditure, Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, Regional Financial Independence

### 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999 mengakibatkan perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi menuju desentralisasi. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah pusat memberi wewenang ke pemerintah daerah beserta sumber pembiayaan supaya daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan sendiri sehingga kemandirian fiskal daerah dapat dicapai.

Kemandirian fiskal daerah mencerminkan kapabilitas daerah dalam mendanai aktivitas pelayanan, pembangunan dan kegiatan pemerintahan lainnya secara mandiri dengan

menggunakan sumber pendapatan dari pajak dan retribusi yang disetor oleh masyarakat (Halim, 2007). Daerah disebut mandiri adalah ketika pengeluaran daerah dapat dibiayai menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan utama tidak bergantung pada dana dari sumber luar. Pendapatan Asli Daerah harus dieksplor dari berbagai potensi lokal oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Kemandirian keuangan daerah mengilustrasikan seberapa besar rasio menggantungkan daerah pada sumber pendanaan pihak eksternal.

**Tabel. 1 Kemandirian Keuangan Daerah di Pulau Jawa**

PROVINSI	TOTAL PENERIMAAN (MILYAR)	TOTAL PAD (MILYAR)	RASIO (%)
DKI Jakarta	62.950	45.635	72,5

Jawa Barat	105.423	35.479	33,7
Jawa Tengah	101.883	32.707	32,1
Jawa Timur	121.180	42.167	34,8
DI Yogyakarta	15.683	5.084	32,4
Banten	35.904	17.560	48,9

Sumber: Analisis Datanesia, 2023.

Berdasarkan data pada tabel kemandirian keuangan daerah oleh Datanesia 2023, provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang tingkat kemandiriannya paling rendah daripada provinsi yang ada di pulau jawa dengan persentase sebesar 32,1 %. Sedangkan provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang tingkat kemandirannya paling tinggi dengan persentase sebesar 72,5 %. Hal ini menunjukkan provinsi Jawa Tengah tetap mempunyai ketergantungan yang relatif besar pada biaya perimbangan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Infrastruktur serta sarana prasarana yang baik dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi yang lancar, aksesibilitas yang baik, dan fasilitas publik yang memadai, daerah dapat menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian Riyadi (2022) menunjukkan belanja modal mempunyai dampak kepada independensi pembiayaan daerah secara positif signifikan. Namun temuan ini tidak sejalan dengan riset oleh Misra Sarumaha & Annisa Annisa (2023) menyatakan belanja modal justru berdampak negatif signifikan pada kemandirian fiskal.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan utama daerah seharusnya akan menciptakan eksternalisasi positif dan memberikan sumbangan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2018). Tingginya PAD akan memberikan pendanaan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur. Temuan Penelitian Dewi (2019) mengatakan PAD terbukti memiliki dampak positif signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya menurut Sri Ayem, (2018) bahwa PAD tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemerintah Daerah yang diambil dari APBN supaya menciptakan penyebaran keuangan di antara daerah-daerah guna memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah Daerah. Jumlah DAU yang suatu daerah terima dapat mempengaruhi seberapa besar anggaran untuk belanja modal. Semakin tinggi DAU, semakin besar kemungkinan untuk memiliki belanja modal lebih besar pula. Menurut Sania Twinki & Retno Widiyanti (2022) menyatakan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh alokasi DAU. Berbeda dengan Rahmitasari & Asyik (2023) menyatakan DAU dan belanja modal tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga mendistribusikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Daerah. Dengan adanya DAK, Pemerintah Daerah memiliki tambahan dana yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan belanja modal mereka dalam sektor-sektor tertentu sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Jumlah dan jenis proyek yang didanai melalui DAK dapat mempengaruhi tingkat belanja modal suatu daerah. Penelitian oleh Dewi (2019) menunjukkan alokasi belanja modal dipengaruhi oleh alokasi DAK. Sedangkan menurut penelitian Sri Ayem (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan pada DAK dan belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) juga salah satu sumber akseptasi daerah. besarnya DBH yang diterima daerah akan memengaruhi kemampuannya untuk mengalokasikan dana pada belanja modal. Penelitian oleh Sania Twinki & Retno Widiyanti (2022), menyatakan DBH mempunyai pengaruh terhadap belanja modal secara negatif dan signifikan. Sedangkan mengutip Wandira (2013) menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal secara positif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dan diharapkan dapat memberikan dampak alokasi belanja modal. Penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda dari variabel-variabel yang

mempengaruhi belanja modal. Belanja modal yaitu komponen penting dalam anggaran daerah yang dipergunakan guna pembangunan infrastruktur dan investasi lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memahami pengaruh masing-masing sumber pendapatan ini sangat penting untuk mengoptimalkan alokasi belanja modal di tingkat daerah.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut penulis melakukan studi terkait faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal dan bagaimana dampaknya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada Kab/Kota di Jawa Tengah. Adapun tujuan dilakukan studi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara penerimaan daerah dari PAD, DAU, DAK serta DBH terhadap investasi pemerintah daerah melalui belanja modal dalam infrastruktur dan aset tetap. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak belanja modal terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, yang menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh temuan empiris yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah

## 2. METODE PENELITIAN

Data yang dikenakan didalam studi ini berupa data sekunder yang diperoleh dari LRA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 untuk mengamati variabel PAD, DAU, DAK, DBH, serta Belanja Modal. Data tersebut diakses secara online melalui situs web <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Populasi didalam riset ini ialah keseluruhan pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2022. Teknik penentuan sampel mengenakan metode Jenuh yaitu menjadikan populasi penelitian menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Jumlah sampel terdiri dari 35 sampel yang berkomposisi 29 Kabupaten dan 6 Kota (35 sampel setiap tahun). Total sampel studi ini sebanyak 175 sampel yang menjadi objek penelitian selama 5 (lima) tahun periode.

Metode analisis yang ditetapkan adalah dengan uji analisis regresi data panel, statistik deskriptif, uji estimasi model, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis meliputi Uji T, Uji F, Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>). Metode analisis regresi data panel bertujuan guna memahami dampak pengaruh yang diakibatkan oleh interaksi setiap variabel, baik antara variabel dependen dan independen serta berorientasi guna memperkirakannya nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen menjadikan fluktuasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Output analisis deskriptif dengan Eviews 12 SV menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) sebanyak 175. Hasil deskriptif menunjukkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 didapaknya nilai rata-rata senilai 0,19 dengan nilai terendah senilai 0,09 adalah Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2018. Nilai tertinggi senilai 0,51 pada Pemerintah Kota Semarang tahun 2022. Adapun nilai median senilai 0,17 dengan nilai standar deviasi senilai 0,07.

Variabel Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 328.351.475.031,38. Nilai minimum sebesar 75.192.210.131 didapatkan oleh Pemerintah Kota Salatiga tahun 2022 dengan nilai maksimum sebesar 1.611.808.054.093 diperoleh Pemerintah Kota Semarang tahun 2018. Variabel BM memiliki standar deviasi sebesar 181.140.532.383,66 sedangkan nilai median sebesar 291.314.088.408.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 423.710.784.022,31. Nilai minimum sebesar 190.122.968.000 didapatkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2018 dengan nilai maximum senilai 2.545.991.747.658 dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang tahun 2022. Variabel PAD memiliki standar deviasi sebesar 323.302.836.331,14 sedangkan nilai median sebesar 354.246.627.000.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 934.516.688.560. Nilai minimum sebesar 409.629.499.000 dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang tahun 2021-2022 dengan nilai maksimum sebesar 1.441.765.282.000 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2019. Variabel DAU memiliki standar deviasi sebesar 241.304.571.762,33 sedangkan nilai median sebesar 928.866.409.000.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 324.316.615.296,85. Nilai terkecil sebesar 72.134.446.768 pada Pemerintah Kota Salatiga tahun 2020 dengan nilai terbesar sebesar 627.195.412.941 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2022. Variabel DAK memiliki standar deviasi sebesar 110.201.928.651,91 sedangkan nilai median sebesar 328.402.381.276.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 53.748.207.969,19. Nilai minimum sebesar 13.708.501.560 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2019 dengan nilai maksimum sebesar 313.040.612.019 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2022. Variabel DBH memiliki standar deviasi sebesar 47.811.591.723,29 sedangkan nilai median sebesar 40.634.282.196.

#### Uji Chow

Nilai Prob. Cross-section Chi-square menunjukkan nilai  $0,0000 < 0,05$  yang berarti model paling baik yang dipilih berdasarkan uji chow dengan Eviews 12 SV untuk persamaan I dan II yakni *Fixed Effect Model* (FEM). Prosedur berikutnya yaitu melaksanakan Uji Hausman pada kedua persamaan guna menyeleksi model paling baik yang akan dikenakan apakah *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM).

#### Uji Hausman

Output uji hausman memaparkan angka Prob. Cross-section senilai kurang dari 0,05, sehingga model terbaik untuk mengestimasi data

panel persamaan I dan II adalah menggunakan model pendekatan FEM. Uji chow dan Uji Hausman untuk kedua persamaan sama-sama menghasilkan penggunaan model terbaik adalah FEM, maka tidak perlu dilakukan Uji LM.

#### Uji Asumsi Klasik

Output uji multikolinieritas menunjukkan nilai  $r$  atau koefisien korelasi variabel PAD dan DAU sebesar  $0,339449 < 0,85$ , variabel PAD dan DAK senilai  $0,231940 < 0,85$ , variabel PAD dan DBH senilai  $0,493201 < 0,85$ , variabel PAD dan BM senilai  $0,693253$ , variabel DAU dan DAK senilai  $0,833281 < 0,85$ , variabel DAU dan DBH senilai  $0,038604 < 0,85$ , variabel DAU dan BM senilai  $0,539097 < 0,85$ , variabel DAK dan DBH senilai  $0,073709 < 0,85$ , variabel DAK dan BM senilai  $0,412153$ , variabel DBH dan BM senilai  $0,350716 < 0,85$ . Hingga didapat kesimpulan berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, secara keseluruhan tidak ada gejala multikolinieritas / tidak ada hubungan antara variabel independen, sehingga bisa dikatakan lolos uji multikolinieritas.

Sedangkan Hasil uji heteroskedastisitas persamaan I dan II menunjukkan nilai probabilitas seluruh variabel  $> 0,05$ . Oleh karena itu dapat simpulkan bahwa dalam persamaan I dan II dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

#### Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel Persamaan I**

Var.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7,47E+11	2,11E+11	-3,531159	0,0006
PAD	-0,310976	0,110063	-2,825441	0,0054
DAU	1,063634	0,189960	5,599258	0,0000
DAK	0,581298	0,169519	3,429090	0,0008
DBH	0,454438	0,333902	1,360992	0,1758
Adj. R Sq.	0,761018			
Prob. (F-St)	0,000000			

Sumber: Output Eviews 12 SV

**Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel Persamaan II**

Var.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,08E-01	3,07E-02	6,775635	0,0000
PAD	2,28E-13	1,57E-14	14,47609	0,0000
DAU	-1,19E-13	2,93E-14	-4,082276	0,0001
DAK	-2,03E-14	2,45E-14	-0,829537	0,4083
DBH	1,19E-15	4,67E-14	0,025578	0,9796
BM	3,94E-15	1,19E-14	0,331022	0,7411
Adj. R Sq.	0,969814			
Prob. (F-St)	0,000000			

Sumber: Output Eviews 12 SV

Persamaan regresi berdasarkan output Eviews 12 SV untuk persamaan I dan II adalah yakni:

$$BM = -7.4682 - 0.3110 \cdot PAD + 1.0636 \cdot DAU + 0.5813 \cdot DAK + 0.4544 \cdot DBH$$

$$KKD = 0,2078 + 2,2757 \cdot PAD - 1,1941 \cdot DAU - 2,0347 \cdot DAK + 1,1936 \cdot DBH + 3,9402 \cdot BM$$

#### Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil uji untuk persamaan I menunjukkan nilai adjusted R-squared 0,761018 atau 76,10 %. Sehingga dapat dijelaskan variabel PAD, DAU, DAK, serta DBH dapat memaparkan variabel BM sebesar 76,10%,., senilai 23,9% dipaparkan variabel lain yang tidak diriset dalam studi ini.

Sedangkan output analisis untuk persamaan II menunjukkan nilai adjusted R-squared 0,969814 atau 96,98%. Hingga didapat kesimpulan variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan BM bisa menafsirkan variabel KKD senilai 96,98%, senilai 3,02% dipaparkan variabel lain yang tidak masuk didalam riset.

#### Uji F

Output uji F untuk persamaan I didapat nilai Prob(F-statistik) senilai 0,0000 < 0,05 yang berarti PAD, DAU, DAK dan DBH sejalan simultan/ bersamaan berdampak kepada Belanja Modal. Sedangkan uji F untuk persamaan II menunjukkan nilai Prob(F-statistik) senilai 0,0000 < 0,05, sehingga kesimpulannya bahwa variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan BM sejalan simultan berdampak pada Kemandirian Keuangan Daerah.

#### Uji Hipotesis (Uji t)

Output uji t nilai sig PAD 0,0054 < 0,05. Adapun nilai t hitung menunjukkan angka negatif,

sehingga hal ini dapat disimpulkan H1 ditolak. Tafsirnya PAD berdampak negatif kepada Belanja Modal. Nilai sig DAU senilai 0,0000 < 0,05. Adapun nilai t hitung menunjukkan nilai yang positif, sehingga hal ini dapat disimpulkan H2 diterima. Tafsirnya DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Nilai signifikansi DAK senilai 0,0008 < 0,05. Adapun nilai t hitung menunjukkan angka yang positif, sehingga hal ini dapat disimpulkan H3 diterima. Tafsirnya DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Nilai signifikansi DBH senilai 0,1758 > 0,05. perihal ini bisa disimpulkan H4 ditolak, tafsirnya DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Output uji t untuk persamaan 2 dipahami PAD nilai signifikansinya 0,0000 < 0,05. Adapun nilai t hitung menunjukkan angka yang positif, sehingga dapat disimpulkan H5 diterima. Artinya PAD berpengaruh positif terhadap KKD. Nilai signifikansi DAU senilai 0,0001 < 0,05. Adapun nilai t hitung menunjukkan angka negatif, sehingga kesimpulannya H6 diterima. Artinya DAU berpengaruh negatif terhadap KKD. Nilai signifikansi DAK sebesar 0,4083 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan H7 ditolak, tafsirnya DAK tidak berpengaruh terhadap KKD. DBH memiliki nilai signifikansi sebesar 0,9796 > 0,05, kesimpulan H8 ditolak, tafsirnya DBH tidak berpengaruh terhadap KKD.

#### Uji Variabel Intervening (Uji Sobel)

Pengujian Sobel Test dilakukan dengan alat uji yaitu menggunakan *Calculating for The Sobel Test* yang tersedia di website <https://quantpsy.org/>. Hasil uji diperoleh besarnya nilai Sobel test statistic variabel PAD adalah -3,28739045 yang berarti < 1,96 dan nilai signifikansi 0,00101121 < 0,05. adapun kesimpulan H10 yang bernarasi Belanja Modal memediasi pengaruh PAD terhadap KKD diterima.

Nilai Sobel test statistic variabel DAU adalah 2,84935121 yang berarti < 1,96 dan nilai signifikansi 0,00438085 < 0,05. Hingga dapat disimpulkan H11 yang bernarasi Belanja Modal memediasi pengaruh DAU terhadap KKD diterima.

Nilai Sobel test statistic DAK adalah 2,38174515 yang berarti > 1,96 dan nilai signifikansi 0,01723082 < 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan H12 yang berbunyi Belanja Modal memediasi pengaruh DAK terhadap KKD diterima.

Nilai Sobel test statistic variabel DBH adalah 1,25867101 yang berarti  $< 1,96$  dan nilai signifikansi  $0,20814919 > 0,05$ . Hingga bisa disimpulkan H13 yang berbunyi Belanja Modal memediasi pengaruh DBH terhadap KKD ditolak.

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Output regresi menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal secara negatif. Hal ini menandakan ketika terjadi peningkatan PAD maka alokasi BM akan menurun, sebaliknya ketika PAD menurun maka alokasi BM akan meingkat. Salah satu faktor yang bisa menjadi penjelasan dari hasil penelitian ini adalah peran besar pemerintah pusat. Porsi PAD yang masih relatif sedikit dibandingkan total pendapatan banyak di temukan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang berarti sebagian besar porsi pendapatan daerah dibiayai oleh pemerintah pusat. Pada akhirnya besaran alokasi belanja modal lebih banyak ditentukan oleh besaran dana dari pemerintah pusat disandingkan dengan PAD. Penelitian ini mendukung penelitian oleh Subowo & Wati (2010), hasil studi memaparkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap BM.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Temuan studi ini mengkonfirmasi bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Dengan adanya DAU yang mencukupi, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar guna membiayai pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana aset tetap penunjang di daerah. penelitian oleh Rohmatullah et al. (2023) menunjukkan hasil yang serupa bahwa Dana Alokasi Umum memiliki dampak positif terhadap BM.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Output analisis diperoleh hasil adanya pengaruh positif DAK terhadap BM. Hal ini

menggambarkan DAK berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan aset publik kabupaten/kota di Jawa Tengah. DAK terbukti mampu memberikan dorongan signifikan dalam alokasi belanja modal, sebab DAK yang diberikan kepada pemerintah daerah bersifat *earmarked* atau sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat yang salah satunya adalah guna menyokong pembangunan dan pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Oleh karena itu, studi ini mampu menegaskan bahwa semakin besar DAK yang diterima daerah, lalu makin meningkat pula kesediaan dan akomodasi pelayanan dan fasilitas lewat belanja modal daerah (Ananda & Habiburrahman, 2023).

#### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal**

Output studi menunjukkan tidak adanya pengaruh DBH kepada alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan studi ini mendukung studi dilaksanakan sama Marliana et al. (2022), output studi menafsirkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap BM. DBH seringkali memiliki keterbatasan dalam penggunaannya dikarenakan adanya ketentuan atau mandat yang mengikat penggunaan DBH sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Mandatori ini membuat daerah tidak memiliki keleluasaannya dalam mengalokasikan DBH untuk investasi publik dengan BM.

#### **Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Berlandaskan temuan uji analisis regresi dalam penelitian ini diperoleh hasil hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah diterima, disimpulkan peningkatan PAD akan diikuti peningkatan KKD, kebalikannya makin kecil sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah maka akan makin kecil pula level KKD. Dengan diterimanya hipotesis ini, disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD nya maka akan lebih mandiri dan tidak tergantung pada biaya perimbangan dari Pemerintah Pusat. Temuan ini selaras dengan temuan studi yang dilaksanakan oleh oleh Indrianingrum & Priyono (2023), hasil

penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

#### **Pengaruh DAU Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Penelitian ini memberikan hasil diterimanya hipotesis bahwa DAU berdampak negatif kepada Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat diketahui bahwa porsi DAU lebih besar dibandingkan dengan PAD yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Sehingga, DAU memberi dampak yang lebih tinggi ketimbang dampak PAD kepada belanja daerah yang tafsirnya regulasi belanja daerah lebih didominasi oleh DAU ketimbang peran PAD. Perihal ini bisa dimaknai DAU dan PAD memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Tahar & Zakhiya, 2011). Prapat et al. (2021) dalam penelitiannya juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### **Pengaruh DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Output studi ini membuktikan bahwa DAK tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada kemandirian keuangan daerah. Artinya meskipun DAK ialah dana dari pemerintah pusat, tetapi tidak secara langsung berdampak terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. seberapa besarpun DAK yang diterima tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini dimungkinkan sifat DAK yang spesifik dan terbatas pada kegiatan tertentu yang telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. DAK tidak memberikan wewenang bagi daerah untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan belanja strategis daerah. Pemda cuma menjalankan program yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat DAK lebih seperti bantuan pelaksanaan program daripada sumber utama penerimaan yang menjadikan ketergantungan mempengaruhi kemandirian. Temuan serupa ditemukan pada studi oleh Setiawan et al. (2021), menjelaskan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

#### **Pengaruh DBH Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Temuan studi ini menafsirkan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dalam praktiknya, kemandirian keuangan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah DBH yang diterima oleh daerah. faktor lain yang memiliki peran lebih dominan adalah porsi PAD, pengelolaan keuangan daerah, dan kontribusi sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Umum. Temuan studi ini mendukung studi dilaksanakan sama Marizka (2013) temuan studi memaparkan output bahwa DBH tidak mempunyai dampak signifikan terhadap KKD.

#### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Analisis regresi didalam studi menafsirkan hasil bahwa Belanja Modal tidak berdampak kepada kemandirian keuangan daerah. Hal ini bisa disebabkan karena alokasi belanja modal yang tidak tepat guna dan penggunaannya tidak efisien. Dimungkinkan daerah mengalokasikan belanja modal untuk pengadaan aset yang tidak mampu menghasilkan PAD, sehingga alokasi belanja modal tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Temuan studi ini mendukung studi yang dilakukan Andriana (2020), output studi menunjukkan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi KKD.

#### **Peran Belanja Modal Dalam Memediasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Output studi membuktikan Belanja Modal mampu memediasi pengaruh PAD kepada Kemandirian Keuangan Daerah. Ketika PAD dialokasikan untuk belanja modal, daerah tidak hanya meningkatkan aset daerah tetapi juga meningkatkan potensi pendapatan yang berkelanjutan. Ketika terjadi peningkatan produktifitas, maka keterampilan rakyat guna membayar pajak dan retribusi semakin meningkat hingga akan menumbuhkan PAD yang akan bermuara pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hasil riset ini bertolak belakang dengan riset yang dilakukan oleh Nurliza Arpani & Halmawati (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal terbukti tidak memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian

keuangan daerah pada Kab/Kota di Provinsi Riau

**Peran Belanja Modal Dalam Memediasi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Output uji dalam studi ini menafsirkan belanja modal mampu memediasi pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Bisa dikatakan bahwa belanja modal menjadi jembatan yang menghubungkan DAU dengan kemandirian keuangan melalui pengadaan dan peningkatan aset daerah dan pengembangan ekonomi daerah. Penggunaan DAU untuk belanja modal membantu daerah untuk mandiri secara finansial dan tidak terhubung kepada biaya dari pemerintah pusat, karena daerah memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Output studi ini bersebrangan dengan temuan studi yang dilaksanakan Nurliza Arpani & Halmawati (2020), dimana dalam penelitiannya dijelaskan bahwa BM tidak terbukti menjadi variabel mediasi antara dana perimbangan dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Peran Belanja Modal Dalam Memediasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Temuan studi menafsirkan belanja modal mampu memediasi pengaruh DAK terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemanfaatan DAK untuk belanja modal yang tepat, terbukti mampu meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian finansial pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal yang didanai oleh dana perimbangan berupa DAK terbukti mampu meningkatkan perolehan PAD melalui pemanfaatan infrastruktur dan aset tetap. Hal ini membuat daerah mampu secara bertahap untuk lepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Artinya, daerah akan lebih mandiri secara finansial karena memiliki sumber pendapatan dari pemanfaatan infrastruktur dan aset yang dibangun menggunakan belanja modal. Hasil riset ini bertentangan dengan temuan riset yang dilakukan oleh Nurliza Arpani & Halmawati (2020), dimana dalam penelitiannya memberi kesimpulan bahwa belanja modal tidak terbukti memediasi menjadi variabel mediasi antara dana

perimbangan dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kab/Kota di Provinsi Riau. Dalam penelitian tersebut, salah satu bentuk dana perimbangan yang dianalisis adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Peran Belanja Modal Dalam Memediasi Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Temuan studi menunjukkan belanja modal tidak memediasi pengaruh DBH pada Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Bagi Hasil seringkali mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya dikarenakan adanya ketentuan atau mandat yang mengikat penggunaan DBH selaras pada kebijakan perundang-undangan. Mandatori ini membuat daerah tidak memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan DBH untuk investasi publik dengan belanja modal. Sehingga, meskipun DBH memberikan alokasi dana tambahan pada penerimaan daerah, akan tetapi tidak mampu berkontribusi secara signifikan pada belanja modal. Sehingga harapan besar peningkatan PAD melalui belanja modal berupa pengadaan aset tetap yang dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam memberi akomodasi umum tidak bisa terwujud yang pada akhirnya tidak mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Temuan dalam studi ini selaras sama dengan temuan yang diperoleh dalam studi yang dilaksanakan oleh Nurliza Arpani & Halmawati (2020), mereka menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki peran sebagai variabel yang dapat memediasi hubungan dana perimbangan dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil studi menjelaskan bahwa belanja modal yang didanai melalui PAD, DAU, serta DAK terbukti mampu meningkatkan perolehan PAD melalui pemanfaatan infrastruktur dan aset daerah. Hal ini membuat daerah mampu secara bertahap untuk lepas dari ketergantungan terhadap dana dari pemerintah. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mampu berkontribusi signifikan pada belanja modal, sehingga harapan besar peningkatan PAD melalui belanja modal berupa pengadaan aset tetap yang dapat meningkatkan kapasitas daerah



dalam memberikan pelayanan publik tidak bisa terwujud yang pada akhirnya tidak mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Implikasi studi ini bisa didesain dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan berorientasi peningkatan kemandirian fiskal.

Pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan potensi penerimaan berupa pajak dan retribusi daerah dan perlu memperbaiki penggunaannya agar lebih tepat guna dan efektif. Pemerintah juga disarankan guna mengevaluasi penyaluran dan penggunaan dana transfer agar lebih mendorong daerah guna menumbuhkan kemandirian keuangan daerah. Melalui langkah-langkah ini, daerah diharapkan bisa membangun kapasitas keuangan yang kuat dan Menekan dependensi alokasi dana dari pemerintah pusat.

## 5. REFERENSI

- Ananda, F., & Habiburrahman. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7437–7448.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Dewi, E. P. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Barat. *Journal of Economic*, 01(04), 1–19.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, dan DBH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG PADA TAHUN 2006 – 2021. *Jurnal Economina*, 2(1), 1210–1221. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.269>
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg*, 26(4), 1–37.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Misra Sarumaha, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.199>
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Prapat, E. P., Hutagalung, dDebora silvia, & Malau, ece ida. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhap kemandirian keuangan daerah di kota pematangsiantar. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Rahmitasari, A. N., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–23.
- Riyadi, W. (2022). Nomor 1 Periode Februari-

- Agustus. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 3, 298–314.
- Rohmatullah, S. T., A. K. Z., & Hartaty, S. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. 12(2), 2085–2401.  
<https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksistensi>
- Sania Twinki, B., & Retno Widiyanti, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489–504.  
<http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi & Publik*, 8(2), 55–58.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53.  
<https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Sri AYem, D. D. P. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Journal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)*, 2(2), 169–182.  
<https://core.ac.uk/reader/230381980>
- Subowo, & Wati, E. R. (2010). Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 73–82.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. In *Accounting Analysis Journal* (Vol. 2, Issue 33, pp. 44–51).